

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
KELOMPOK NELAYAN DI KELURAHAN TANJUNG MAS,
KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG**

Firman Saputra Napitupulu¹, Ari Subowo², Teuku Afrizal³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang sampai saat ini masih sulit untuk diatasi Pemerintah Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan ini adalah Kecamatan dengan angka kemiskinan tertinggi kedua yaitu mencapai 27.245 jiwa di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jaringan *stakeholders* dan peran dari setiap *stakeholders* dalam program pengentasan kemiskinan. Berbasis metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang ada dalam penelitian ini telah dipilih sejumlah 10 orang secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* kunci adalah Dinas Sosial Kota Semarang karena menjadi *stakeholders* yang bertanggung jawab sebagai penyedia data kemiskinan di Kota Semarang. Data tersebut merupakan dasar pemberian program pengentasan kemiskinan, seperti, program PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tentunya berkoordinasi dengan Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Tanjung Mas, sebagai *stakeholders* primer dalam pengumpulan data kemiskinan. Sedangkan *stakeholders* sekunder adalah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kelompok Usaha Bersama dan Ketua RT yang juga membantu masyarakat nelayan dengan bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengakselerasikan program-program pemerintah. Sedangkan Masyarakat merupakan *stakeholders* tersier yang berperan sebagai penerima dan pelaksana kebijakan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat empat jaringan *stakeholders* dengan peran yang berbeda dari setiap *stakeholders*. Saran yang dapat diberikan perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan *Stakeholders* yang ada dan Dinas Sosial juga diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Jaringan *Stakeholders*, , Pengentasan Kemiskinan Nelayan

**THE ROLE OF *STAKEHOLDERS* IN POVERTY ALLEVIATION OF
FISHERMAN GROUPS IN TANJUNG MAS URBAN VILLAGE, NORTH
SEMARANG SUB-DISTRICT, SEMARANG CITY**

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem that is still difficult to get over by the Semarang City Government, especially in the North Semarang District area. This sub-district is stated as the sub-district with the second-highest poverty rate with 27,245 poor in 2020. This study aims to examine the stakeholders' network and their role in poverty alleviation programs. Grounded by the descriptive qualitative method, data collection was conducted via observation, interviews, and documentation. In this study, ten informants were selected through the purposive sampling technique. The results show that the key stakeholder is the Semarang City Social Service because it provides poverty data in Semarang. This data is the basis for providing poverty alleviation programs, including the PKH program, Smart Indonesia Card, and BPNT (Non-Cash Food Assistance). Coordinate to the North Semarang District Tanjung Mas Village as primary stakeholders who act as coordinators and facilitators in poverty alleviation. Secondary stakeholders are the Indonesian Traditional Fishermen's Union, Joint Business Group, and Head of RTs, who act as accelerators in assisting the Government in implementing poverty alleviation programs. Meanwhile, the community is a tertiary stakeholder who acts as a recipient and implementer of policies. This study concludes that there are four stakeholder networks with different roles for each stakeholder. Suggestions that can be given the need to improve coordination in the existing stakeholder network and the Social Service are also expected to provide data and be directly involved in the implementation of poverty alleviation programs.

Keywords: Stakeholders Network, Fishermen Poverty Alleviation

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan berasal dari kata “ miskin” yang secara etimologis didefinisikan sebagai kondisi tidak berharta barang serta serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Disebutkan lebih lanjut bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) ataupun batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Frank Ellis dalam Suharto, (2005: 6), berpendapat bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam berbagai dimensi aspek , yaitu aspek ekonomi, sosial-psikologis dan politik. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan kurangnya sumberdaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memperoleh suatu kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya tentang permasalahan finansial dari individu tersebut, akan tetapi juga menyangkut semua aspek kekayaan (*wealth*) yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam definisi yang lebih luas. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Semarang. berikut merupakan data kemiskinan per Kecamatan di Kota Semarang :

Tabel 1. Data Warga Miskin Per Kecamatan di Kota Semarang

No	Wilayah Kecamatan	Jiwa	Persentase
1	Semarang Tengah	10.205	4.4 %
2	Semarang Utara	27.245	10 %
3	Tembalang	23.549	9.1%
4	Ngaliyan	14.292	5.1%
5	Genuk	21.109	6.8%
6	Candisari	16.133	6.2%
7	Semarang Timur	19.592	7.1%
8	Gunung Pati	18.789	7.3%
9	Gayamsari	14.569	5%
10	Semarang Selatan	13.159	5.1%
11	Semarang Barat	28.960	10%
12	Mijen	13.613	5.6%
13	Banyumanik	17.914	6.7%
14	Gajah Mungkur	6.841	2.7%

15	Pedurungan	21.004	7.4%
16	Tugu	4.422	1.5%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan angka kemiskinan tertinggi adalah di Kecamatan Semarang Barat dengan angka kemiskinan mencapai 28.960 jiwa . Sebaliknya angka kemiskinan paling rendah adalah di wilayah Kecamatan Tugu dengan angka kemiskinan 4.422 jiwa. Sedangkan Wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan angka kemiskinan tertinggi kedua, dimana angka kemiskinan mencapai 27.245 jiwa.

Kemiskinan tersebut diakibatkan kurang terjadinya integrasi antar jaringan *stakeholders* yang ada dan peran yang dijalankan belum maksimal sehingga program kemiskinan seperti program PKH, KIP, BPNT dan program kemiskinan lainnya tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan Pemerintah. Disamping masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Utara minim partisipasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ditambah mayoritas warga miskin tinggal di wilayah pesisir yang sering menghadapi kondisi sulit seperti bencana banjir, rob, kekurangan air bersih, dan wilayah kumuh. Tentu partisipasi merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan ataupun program sehingga program bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Untuk menanggulangi kemiskinan , Regulasi yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan yaitu Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017. Implementasi dari kedua payung hukum tersebut diusahakan dari beberapa upaya berikut, yaitu :

1. Meminimalisir tanggungan kebutuhan sehari-hari agar warga miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya, antara lain bantuan pangan non tunai, bea siswa miskin, angkutan BRT, pelayanan kesehatan dengan BPJS, UHC dan ambulance hebat di Kota Semarang ;
2. Penduduk miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup layak dan memiliki akses dalam pelayanan dasar pelayanan dan peningkatan akses air bersih, mencegah BAB sembarangan, penanganan RTH dan peningkatan taman kota sebagai sarana rekreasi keluarga;
3. Memperbesar ruang akses pelayan public terhadap penduduk/ warga miskin seperti pelayan pendidikan, kesehatan, pelatihan skill, rumah belajar, perbaikan kampung tematik.

Dalam hal ini intergrasi peran antara stakeholder sangatlah juga diperlukan, Setiawan B & Nurcahyanto, H. (2020) yang meneliti peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan angka kematian ibu seperti Dinas Kesehatan Kota Semarang, Tenaga Kesehatan, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan. FKK, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, Keluarga, Dunia Usaha, dan Institusi Pendidikan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penanggulangan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Ini karena kolaborasi yang terjadi diantara *stakeholders* yang berkepentingan dalam penanggulangan angka kematian ibu adalah kunci keberhasilan implementasi dari setiap program pengentasan kemiskinan yang dijalankan.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana identifikasi jaringan *stakeholders* dan peran *stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

B. KAJIAN TEORI

Menurut pendapat Moore dalam Anggara, (2014: 187), *Stakeholders* yang terlibat dalam suatu kebijakan terbagi atas tiga unsur, yaitu unsur state atau pemerintah, unsur privat atau swasta, unsur masyarakat (society).

Viney (dalam Suwitri, 2011) berpendapat bahwa *stakeholders* dapat dimasukkan kedalam 4 kategori yaitu

1. Primer: *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara partner;
2. Sekunder: *Stakeholders* dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara *consult*;
3. Tersier, yaitu *Stakeholders* dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara *inform*;
4. Kwartir, yaitu *Stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara kontrol.

Dalam mengidentifikasi jaringan *Stakeholders*, Bryson (2004 : 15) menjelaskan bahwa dalam memetakan *Stakeholders* dapat dilakukan dengan 8 teknik tetapi apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teknik pemetaan *Stakeholders* yang digunakan adalah *Power Versus Interest Grid*. Teknik Analisis ini fokus utamanya adalah *power dan interest dengan keterangan :*

- a. *Subjects* adalah *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah
- b. *Key Players* adalah *Stakeholders* dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi

- c. *Context Setter* merupakan *Stakeholders* yang mempunyai pengaruh yang tinggi akan tetapi tingkat kepentingan yang rendah
- d. *Crowd* merupakan *Stakeholders* dengan sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan

Nugroho dalam Fitri & Hardi, (2017) mengemukakan beberapa bentuk peran *stakeholders* , yaitu

- a. *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang mempunyai peran dalam pengambilan keputusan dan penentu suatu kebijakan
- b. Koordinator yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat
- c. Fasilitator yakni *stakeholders yang berperan* sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran
- d. Implementor yakni *stakeholders* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran
- e. Akselerator yakni *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif , dimana menurut Nasution (1988 : 5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan “ paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif” . Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dan objek yang ada pada lingkungan hidup, melakukan interaksi dengan objek penelitian, dan berupaya masuk dalam kebudayaan dan memahami bahasa dari objek suatu penelitian.

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengidentifikasi *stakeholders* serta menganalisis peran dari setiap *stakeholder* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas. Informan dalam penelitian ini dipilih sebanyak 10 orang berdasarkan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Sumber data terdiri dari data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi . Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, berita dan informasi dari internet.

Dengan teknik analisis dan interpretasi data milik Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246-252) yakni analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini juga menggunakan pengujian validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu menjelaskan jika hasil yang diinginkan dengan menggunakan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti

pada data atau informasi yang dicari dan tidak hanya melihat kebenaran dari suatu fenomena.

D. PEMBAHASAN

A. Identifikasi Jaringan *stakeholder*

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas dibagi menjadi tiga unsur menurut Moore dalam Anggara (2014 :187) , yaitu unsur *state* adalah Dinas Sosial Kota Semarang, Kecamatan Semarang Utara, dan Kelurahan Tanjung Mas. Unsur *private* adalah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan CSR di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, seperti Indonesia Power. Unsur *society* adalah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tambak Lorok dan masyarakat nelayan Tambak Lorok.

Mengacu pada pendapat , Viney dalam Suwitri, (2011) , berpendapat bahwa *Stakeholders* dapat diidentifikasi kedalam 4 kategori yaitu :

1. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi, dimana didalam penelitian peran *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas , *Stakeholders* yang masuk dalam kategori sebagai ini adalah Dinas Sosial Kota Semarang, Kec.Semarang Utara dan Kel.Tanjung Mas
2. *Stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi, akan tetapi tingkat kepentinganya rendah, dimana setelah melakukan penelitian dan wawancara terkait dengan permasalahan pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, *Stakeholders* yang masuk dalam kategori sebagai *Stakeholders* sekunder adalah Organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Forum KUB Tambak Lorok dan Ketua RT 01/ RW 15
3. *Stakeholders* tersier merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh yang rendah akan tetapi tingkat kepentingannya tinggi, dimana setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber terkait dengan permasalahan pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, *Stakeholders* yang masuk dalam kategori sebagai *Stakeholders* tersier adalah Masyarakat (*society*).
4. *Stakeholder* Kwartir merupakan *stakeholders* yang pengaruh dan tingkat kepentingannya rendah,dimana setelah melakukan penelitian terkait dengan peran *Stakeholders* dari berbagai narasumber dalam permasalahan pengentasan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa tidak ada *Stakeholders* yang termasuk didalam kategori ini, karena setiap *Stakeholders* yang telah diwawancarai memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda atau secara spesifik tidak

dapat dikatakan dan dimasukkan dalam *Stakeholders* kwarter.

B. Peran Stakeholder

Untuk mengetahui peran dari masing-masing stakeholders dalam implementasi kebijakan maka Nugroho dalam Fitri & Hardi, (2017) mengklasifikasikan peran stakeholder kedalam policy creator, implementator, fasilitator, coordinator dan akselerator. Dimana peran dari masing-masing stakeholders tersebut akan dijelaskan pada tabel 2 tentang peran stakeholders dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

Tabel 2. Peran Stakeholders menurut Nugroho dalam Fitri & Hardi, (2017)

NO	PERAN STAKEHOLDERS	STAKEHOLDERS	Kegiatan Terkait Peran
1	Policy Creator	Dinas sosial Kota Semarang	Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 68 Tahun 2016 Pasal ke lima dijelaskan bahwa Dinas Sosial mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial mempunyai peran sebagai Policy Creator dalam pengentasan kemiskinan.
2	Koordinator	- Dinas Sosial Kota Semarang - Kecamatan Semarang Utara - Kelurahan Tanjung Mas - Ketua RT 01/ RW 15 Tambak Lorok	Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, dijelaskan bahwa dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana yang menjadi perwujudannya adalah ke empat <i>stakeholders</i> tersebut. Sehingga dalam pengentasan kemiskinan, <i>stakeholders</i> tersebut tentu

			harus menjalankan perannya dengan saling berkoordinasi dan bekerjasama didalam pengentasan kemiskinan.
3	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial Kota Semarang - Kec. Semarang Utara - Kelurahan Tanjung Mas 	Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 pasal ke lima, berikut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh <i>stakeholders</i> tersebut yaitu penyusunan daftar awal sasaran, bimbingan teknis, musyawarah kelurahan, kunjungan ke rumah tangga, pengolahan data, pengawasan dan pemeriksaan, serta pelaporan. Selain itu, berikut merupakan peran yang dijalankan oleh <i>stakeholders</i> tersebut yaitu memfasilitasi masyarakat dalam program Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program lainnya.
4	Implementor	<ul style="list-style-type: none"> - Forum KUB Tambak Lorok - Masyarakat Nelayan Tambak Lorok 	<i>Stakeholders</i> yang melaksanakan setiap agenda program dan kegiatan, Forum KUB dan masyarakat nelayan dimasukkan dalam kategori ini karena tentunya <i>Stakeholders</i> tersebut menjadi kelompok sasaran dalam permasalahan pengentasan kemiskinan. Forum KUB

			sebagai komunitas perwakilan masyarakat nelayan yang sudah banyak mendapatkan bantuan juga program dari berbagai pihak.
5	Akselerator	- KNTI - FORUM KUB Tambak Lorok	KNTI telah banyak membantu masyarakat nelayan, seperti beberapa program bantuan yang telah diberikan kepada warga yaitu, pemberian bantuan pinjaman kepada 30 warga nelayan Tambak Lorok, Pelatihan-pelatihan untuk memasarkan hasil tangkapan, dan melatih ibu-ibu nelayan membuat kerajinan tangan. Sedangkan Forum KUB berperan sebagai organisasi yang merangkul semua warga nelayan di wilayah Tambak Lorok, seperti penyaluran bantuan dari pemerintah dan dan membantu Ketua RT/RW untuk melakukan pendataan warga nelayan.

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2020

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Stakeholders yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang adalah Dinas Sosial Kota Semarang sebagai *stakeholders* kunci karena berperan sebagai penyedia data kemiskinan yang merupakan data acuan dalam pemberian program pengentasan kemiskinan, seperti PKH, KIP, KIS, dan BPNT. Dinas Sosial memiliki wewenang dalam pengambilan dan perumusan kebijakan menurut Peraturan Walikota Semarang No 68 Tahun 2016 Pasal ke lima berperan sebagai *policy creator*, koordinator, dan fasilitator.

Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Tanjung merupakan *stakeholders* primer karena memiliki keterlibatan langsung dalam pengumpulan data warga miskin. Kedua *stakeholders* tersebut berperan sebagai koordinator dan fasilitator karena

juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pemberian bantuan program kepada masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Tanjung Mas.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Forum KUB Tambak Lorok dan Ketua RT 01/RW 15 Tambak Lorok sebagai *stakeholders* sekunder karena hanya berperan sebagai Akselerator atau pendukung dalam usaha pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas. Sedangkan masyarakat nelayan merupakan *stakeholders* tersier sebagai *stakeholder* yang berperan sebagai implementor atau penerima dan pelaksana kebijakan dalam usaha pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

B. Saran

1. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masyarakat nelayan, karena dalam implementasinya, program kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Semarang masih general dan belum menuju kepada kelompok nelayan.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan *stakeholders* pengentasan kemiskinan kelompok nelayan
3. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang masih terbatas, sehingga pemerintah perlu untuk menambahkan pegawai agar dapat memaksimalkan pelaksanaan suatu program.
4. Dinas Sosial diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data kemiskinan, tetapi ikut terlibat langsung dalam implementasi program-program pengentasan kemiskinan.
5. Masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjung Mas mayoritas berpendidikan rendah, dan nelayan tersebut 100% hanya menggantungkan dirinya kelaut, dan apabila cuaca tidak mendukung untuk melaut, maka mayoritas nelayan tidak dapat mencukupi kebutuhannya, karena tidak mempunyai skill lain selain melaut, sehingga perlu adanya pembuatan Koperasi untuk membantu masyarakat nelayan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap ibu-ibu nelayan supaya dapat meningkatkan produktifitas kehidupan masyarakat nelayan dan tidak hanya bergantung kepada hasil tangkapan laut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, S. E. (2018). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*.
- Achmad, N. F. (2018). *ANALISIS PERAN AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN SEMARANG SMART CITY*. Faculty of Social and Political Science.
- Agustang, A. (2017). *Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153.
- Dimitra, S., & Yuliasuti, N. (2012). Potensi kampung nelayan sebagai modal permukiman berkelanjutan di Tambaklorok, kelurahan Tanjung Mas. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 1(1), 11–18.
- Dwiyanto, I. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 356–374.
- Hastuti, R., & Rahutami, A. I. (2011). Akselerasi Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Sinergi Potensi, Program, dan Anggaran di Kabupaten Semarang. *VISI*.
- Hermawan, I. (2019). *JARINGAN ANTAR AKTOR DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*. UNNES.
- Hertanto, D., Sugiyanto, S., & Safitri, R. (2016). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi dan Peran Aktor Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kentang (Petani Kentang Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). *HABITAT*, 27(2), 55–65.
- Irawan, P., Alfitri, A., & Saptawan, A. (2019). Jaringan Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

Jurnal Empirika, 4(1), 1–18.

Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*.

Natalia, M., & Alie, M. M. (2014). Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(1), 50–59.

Larasati, N. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Purwanto, R. (2019). INOVASI KEBIJAKAN: STRATEGI TERPADU MENURUNKAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 16(19), 73–89.

Rahardjo, M. D. (2006). Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. *Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia*.

Renggapratiwi, A. (2009). *Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Sagita, R. A., Dwimawanti, I. H., & Djumiarti, T. (2013). Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(4), 61–70.

Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERSS* DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANGKA KEMATIAN IBU STUDI KASUS KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144.

Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. *Bandung: Alfabeta, CV*.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial*. Alfabeta.

Suyono, H. (2003). *Memotong rantai kemiskinan*. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Trimiaty, K. E. (2018). ANALISA FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS NELAYAN DI KAWASAN TAMBAK LOROK. *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM*, 17(2).

- Ulum, S. (2013). Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi pada Pilot Project Minapolitan Desa Srowo Kecamatan Sidayu Gresik). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 154–162.
- Yuniningsih, T., & Titi Darmi, S. S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *Journal Of Public Sector Innovation*, 3, 84–93.

